TRADISI&ADAT

DISKUSI SJP GATHERING KE-10

YJP PRESS

GATHERING KE-10

Tema: “Tradisi, Adat dan Politik Kesetaraan“

Sabtu, 21 Maret 2015, Pk. 09.00-12.00, Kediaman SJP Prof. Mayling Oey-Gardiner, Ph.D.

Narasumber: Sapariah Saturi (Mongabay Indonesia), Assoc Prof Patrick Ziegenhain (Goethe-Frankfurt University, Jerman).**Moderator:** Dr. Phil.Dewi Candraningrum (Pemred JP)

SAMBUTAN: DEEDEE ACHRIANI, HIMAH SHOLIHAH, MAYLING OEY-GARDINER, TOETI HERATY

Deedee Achriani: Kita berjumpa kembali di Gathering Sahabat Jurnal Perempuan, yang ke-10. Terima kasih kepada Bu Mayling Oey yang berkenan menyediakan rumahnya untuk acara hari ini dan juga para Sahabat Jurnal Perempuan yang telah datang dari berbagai daerah, seperti Surabaya, Malang, Bandung dan lain-nya. Saya ucapkan selamat datang juga kepada para Sahabat Jurnal Perempuan yang baru, yang muda-muda, mahasiswa. Acara ini juga akan di-livetweet di akun Twitter kami @jurnalper-empuan, silahkan diikuti. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin mempersilahkan Himah Sholihah sebagai penanggung jawab Sa-habat Jurnal Perempuan memberikan laporan singkat mengenai SJP.

Himah Sholihah: Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Acara Gathering Sahabat Jurnal Perempuan ini kita selengga-rakan 3 bulan sekali dan di dalam acara ini kita bersilaturahmi dan memperluas networking serta berdiskusi mengenai isu-isu perempuan yang ada di tanah air. Acara ini diselenggarakan di rumah para Sahabat Jurnal Perempuan secara bergantian. Ibu Mayling sendiri telah menjadi Sahabat Jurnal Perempuan semen-jak tahun 2012. Sampai saat ini jumlah Sahabat Jurnal Perem-

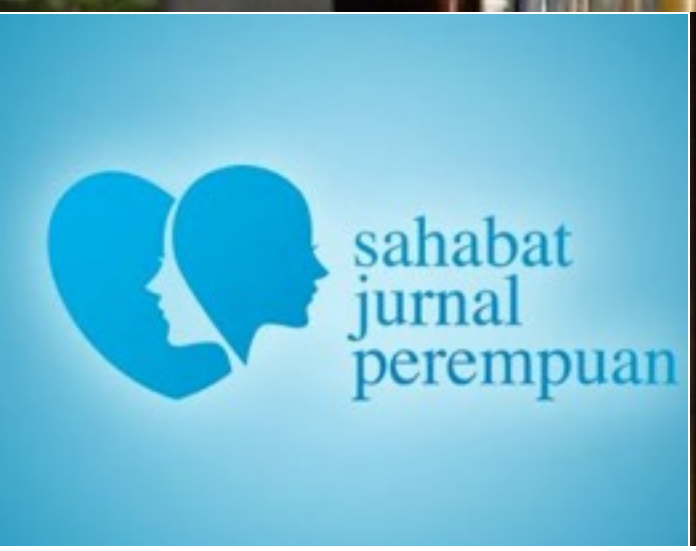

puan ada 655 orang yang meliputi akademisi, LSM, profesional dan umum, serta tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang terbanyak di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta, kami berusaha keras agar Jurnal Perempuan bisa tersebar juga di daerah. Kita juga memiliki beberapa Sahabat Jurnal Perempuan dari luar negeri, seperti dari Bangkok dan Leiden. Sampai saat ini, Sahabat Jurnal Perempuan masih didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 81%. Jadi kami ingin lebih banyak lagi teman-teman laki-laki yang menjadi Sahabat Jurnal Perempuan. Semoga acara ini berjalan lancar dan saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan masukan mengenai Sahabat Jurnal Perempuan. Mungkin selama ini kami ada kekurangan dan pelayanan belum maksimal. Jika ada masukkan, kami sangat menunggu. Mungkin itu saja. Selanjutnya Ibu Mayling sebagai tuan rumah silahkan memberikan sambutan.

Mayling Oey-Gardiner: Selamat pagi semuanya teman-teman Jurnal Perempuan. Terima kasih pada Jurnal Perempuan dan semua pengurus

yang meminta saya mengadakan acara ini, persis yang ke-10 di rumah kami. Rumah kami untuk kami sendiri, “my home, my castle”, jadi kami senang sekali bisa menjamu teman-teman semuanya di sini. Untuk saya, penting menjadi host kali ini. Penting karena memang dalam karier saya, banyak yang tahu saya bersama dengan Bu Sap, dengan Bu Toety, Bu Aida, Bu Pinky, kami sudah begitu lama memperjuangkan kesetaraan, hak-hak untuk perempuan. Untuk saya sendiri, yang saya perjuangkan adalah agar perempuan memperoleh akses berbagai pelayanan publik juga dengan keluarga dan komunitas. Mengapa sampai sekarang demikian banyak hambatannya? Memang acara hari ini sangat sesuai dengan tema budaya dan tradisi. Saya ingin menerangkan sedikit, beberapa hari lalu, hari Rabu, saya menghadiri suatu acara tentang hukum, soal korupsi. Saya berbicara dengan teman yang ahli hukum, saya bilang “hukum itu seperti tradisi ya?”. Tradisi banyak ditentukan oleh laki-laki dan umumnya mengekang perempuan. Jadi saya berharap perempuan dapat kebebasan dan terutama kebebasan akses sehingga mampu bersaing dengan laki-laki di dalam kesetaraan. Hasilnya sudah kita lihat yaitu di bidang pendidikan. Di jenjang bawah sudah lebih banyak perempuan. Di pemerintahan, jenjang bawah sudah semakin banyak diisi perempuan. Pada hari ini sebetulnya gerakan feminisme sudah cukup banyak. Saya bangga sekali. Waktu kita mulai hanya segelintir. Mungkin bisa dihitung awalnya 1 tangan, kemudian 2 tangan. Kami turut bangga. Untuk kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan tentu saja saya ucapkan selamat datang pada semuanya *to our home, our castle.*

Toeti Heraty: Mohon maaf tadi saya menyampaikan bahwa tidak usah memberikan kata sambutan, karena saya masih ngantuk, saya kurang tidur. Tadi saya bangun jam 2 pagi di Bali karena

jam 3 mau berangkat ke bandara dan mau menghindari arak-arakan ogoh-ogoh. Kemudian saya mendengar bahwa tahun ini temanya ogoh-ogoh itu hewan. Jadi ada bermacam-macam hewan ditampilkan lalu dipersonifikasi dari evil, yang tentu sasarannya adalah manusia. Saya tidak tahu mengapa. Dan mereka lalu akan dibuang ke laut. Menurut cerita di Bali, mudah-mudahan tidak keliru, ogoh-ogoh itu bergerak sendiri sebetulnya. Jangan menganggap itu dibawa orang, tetapi mereka yang membawa orang itu. Dan suatu saat geraknya sudah menjadi terlalu kuat, ada tanaman kacang-kacangan yang harus dipukulkan, supaya bisa tenang kembali. Lalu saya ingat seminggu atau 2 minggu lalu saya beramai-ramai pergi ke Bogor untuk merayakan Cap Go Meh. Di situ ada istilah Toa Pe Kong, yang ditaruh di rumah kecil-kecil yang digotong dan bergerak-gerak. Katanya yang menggerakkan bukan manusianya, tetapi Toa Pe Kongnya. Jadi setelah mendengar Toa Pe Kong dan ogoh-ogoh jadi saya mengerti bahwa budaya itu saling mempengaruhi.

Saya ingin menyatakan bersyukur dan bangga bahwa ini semuanya adalah kegiatan Jurnal Perempuan karena kebetulan posisi saya sebagai pendiri. Saya mengingat-ingat kita mengumpulkan uang dengan susah payah. Saya biasanya dikasih uang oleh sekretaris saya dan waktu itu di dalamnya ada amplop terselip sisa-sisa dollar. Saya kira pada saat itu dollar masih Rp 2500, kalau sekarang Rp 13.000-an. Itu menjadi awal dari Jurnal Perempuan. Kita mengumpulkan sedikit-sedikit uang, tetapi kemudian bergerak, berkembang dan itu semua berkat bantuan dari banyak pihak dan tentunya semuanya yang hadir di sini. Saya mau menutup catatan bahwa kesetaraan itu saya kira mengalami orientasi, antusiasme atau fanatisme yang pasang surut di dalam hidup kita. Maka sekarang di usia saya yang sudah ke-81, tentu persepsinya sudah berubah lagi. Saya kira pada suatu saat kita harus menuliskan tentang perubahan persepsi dan pasang surut itu. Terima kasih.

DISKUSI

DEWI CANDRANINGRUM

Sahabat sekalian, selamat datang di Jurnal Perempuan. Selamat datang di rumah Ibu Mayling Oey. Ini adalah hadiah yang sangat luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul karena ikatan emosi yang sangat kuat. Tugas Jurnal Perempuan adalah merawat pengetahuan, dan tugas itu tidak sederhana karena perempuan memiliki kepelbagaian. Di dalam kepelbagaian itu masih banyak mantra-mantra yang belum kami dokumentasikan, masih banyak lorong-lorong yang harus kami buka dan telusuri. Dari situ kajian, riset, dokumentasi amat diperlukan. Tanpa sahabat sekalian, Jurnal Perempuan tidak akan bisa hadir.

Di dalam edisi ke-84 saya melukis “Simbok”. Kalau kita perhatikan lebih serius, tulang pelipisnya menonjol. Ia adalah waria di Sulawesi, religious leader. Seorang perempuan yang tidak bervagina. Di dalam edisi ini ada tulisan pertama yang sangat indah dari Sapariah Saturi, salah satu narasumber kita nanti. Di dalam kalimat pertama tertulis, bahwasanya dalam kepelbagaian itu perempuan ada. Kalau kita melihat sungai, bumi dan kayu adalah sasana, segala sesuatu yang kita pakai, tetapi bagi mereka Suku Dayak Mayaan Kalimantan, sungai, hutan, alam adalah filsafat, pandangan dunia. Itu adalah kepelbagaian yang kami pelajari dengan sangat luar biasa dari sahabat-sahabat yang menulis dan mengkaji di Jurnal Perempuan. Itu adalah perkenalan kita terhadap Sapariah Saturi. Kita berikan tepuk tangan.

Berikutnya adalah Prof. Patrick Ziegenhain. Saya masih ingat di tahun 2005, pertama kali saya bertemu Patrick di Bonn. Waktu itu saya belum lulus, Patrick sudah lulus namun belum profesor. Kita sama-sama aktivis dalam tanda kutip, lalu kita sama-sama dapat hibah hadiah rumah pada waktu itu di Cologne untuk ASIENHAUS, LSM yang kita kelola bersama. Sekarang ia sudah menjadi Profesor di Goethe-Universitat Frankfurt, salah satu Universitas terkemuka di Jerman. Dan sekarang Patrick akan menarasikan kepada kita pengalaman-pengalamannya. Beliau juga pernah mengajar di Universitas Manila. Silahkan Patrick.

PATRICK ZIEGENHAIN

Selamat pagi semuanya. Saya senang sekali dapat hadir di sini. Terima kasih Jurnal Perempuan atas undangannya. Terima kasih Mbak Dewi dan Ibu Mayling. Saya harus mengakui saya bukan ahli gender tetapi saya seorang ilmuwan yang mendalami studi Asia Tenggara di bidang politik dan ekonomi. Dari situ saya bisa berbicara sedikit tentang perempuan Judul pidato saya adalah "Politik Perempuan Asia Tenggara: Tantangan dan Masa Depan". Saya minta maaf Bahasa Indonesia saya belum sempurna tetapi saya akan coba bicara. Dari data yang ada kita tahu perempuan Asia Tenggara tidak punya akses yang sama dengan laki-laki pada banyak hal seperti sistem pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan serta modal dan juga tanah. Yang juga penting,

di dalam bidang politik perempuan tidak punya kemungkinan dan akses kekuatan yang tidak setara dengan laki-laki. Namun ada perbedaan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Ada perbedaan di antara 11 negara yang ada seperti antara Singapura dan Kamboja, kemudian juga ada perbedaan di dalam kebudayaan, agama dan situasi sosial. Terkait hal itu menurut saya ada hubungan atau koneksi antara status ekonomi dan status situasi kesetaraan gender di Asia Tenggara. Saya sudah menyiapkan powerpoint dengan banyak data tetapi di sini tidak memungkinkan diperlihatkan, meski begitu semua data yang saya punya bisa dibagikan. Kita lihat ada perbedaan status ekonomi yang besar di antara negara-negara di Asia Tenggara. Kita tahu Singapura negara terkaya di Asia Tenggara dengan rata-rata pendapatan per tahun hampir 50.000 Dollar AS, begitupun di dalam indeks HDI ia juga negara yang paling maju. Sedangkan indeks yang lebih rendah atau negara yang lebih miskin contohnya Myanmar, Kamboja Dan Laos. Kalau kita lihat data tentang kelahiran perempuan di Asia Tenggara, perempuan yang lebih maju cenderung mempunyai lebih sedikit anak, seperti di Singapura angkanya 1.3, cukup kecil dibandingkan Filipina dan Indonesia. Di Indonesia angkanya 2.4, di Filipina 3.1. Di negara lain lebih banyak, seperti Timor Leste itu angkanya lebih dari 5. Jadi hal itu memiliki korelasi dengan status ekonomi. Tidak hanya itu, kita juga bisa lihat korelasinya di bidang pendidikan, misalnya di negara yang maju seperti Singapura dan Malaysia, ada lebih banyak perempuan yang mengenyam pendidikan. Di negara yang sudah maju ada lebih banyak perempuan yang melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah. Di negara yang lebih miskin seperti Laos, Kamboja dan Myanmar angkanya lebih rendah. Hal itu juga terlihat dari rasio anak perempuan dan laki-laki yang mendaftar universitas, Singapura dan Malaysia lebih tinggi. Indonesia dan Filipina masih terbilang lumayan dan yang cukup rendah ada di Laos, Kamboja dan Myanmar. Di samping itu ada beberapa indeks organisasi dunia seperti UNDP yang menunjukkan bahwa negara terkaya di Asia Tenggara memiliki status perempuan yang lebih tinggi. Tetapi yang menarik adalah di World Economic Forum ada perbedaan indikator partisipasi ekonomi, pencapaian pendidikan, kelangsungan hidup dan kebudayaan politik di Asia Tenggara. Di sana menunjukkan Filipina ada di posisi ke-9 di dunia. Itu merupakan peringkat yang cukup tinggi dan itu bagus sekali. Singapura dan Thailand hanya di posisi 60-an. Jika kita membandingkan Filipina dengan Indonesia, akan terlihat banyak perbedaan. Peringkat ekonomi Fillipina adalah yang ke-24 di dunia karena ada banyak pengusaha perempuan dan juga yang terjun di BUMN maupun menjadi CEO, tetapi Indonesia hanya berada di posisi 108. Jauh berbeda. Begitu juga di bidang pendidikan. Fillipina peringkat ke-11 di dunia sedangkan Indonesia ke-78. Di bidang kesehatan, kelangsungan hidup dan politik Filipina juga memiliki angka yang lebih tinggi. Ada banyak perempuan yang terjun ke politik maupun menjadi senator di Filipina, sedangkan di Indonesia masih rendah. Dari situ jelas bahwa Fillipina memiliki status yang lebih tinggi daripada Indonesia.

Dewi Candraningrum: Jadi dari studi Asia Tenggara tadi Patrick memberikan highlight pada 2 negara yaitu Filipina dan Indonesia karena beliau pernah mengajar di Universitas Manila. Gapnya jauh sekali mulai dari indeks ekonomi, tingkat masuk sekolah dan lain-lain.

Patrick Ziegenhain: Kita bisa lihat bahwa ada korelasi antara status ekonomi dan status perempuan di dalam masyarakat. Di negara yang lebih maju, status perempuan lebih tinggi, meskipun hal itu juga tidak secara otomatis terjadi. Hari ini saya kira pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan status perempuan di masa depan? Peningkatan ekonomi akan menjadi salah satu solusi dalam membantu menaikkan status perempuan. Jika pendidikan baik dan kesempatan kerja baik, tentu akan membantu meningkatkan status perempuan secara umum. Tetapi juga saya kira tidak hanya pembangunan ekonomi. Perlu adanya perubahan dari sistem hukum dan administratif. Penghapusan hukum yang diskriminatif ini penting sekali saya kira. Hakim yang tidak bias, tidak korup dan tau hak perempuan ini penting sekali adanya. Legal framework dan administrative framework yang harus diubah di Asia Tenggara. Yang penting sekali adalah perubahan mindset sosial. Ada banyak sekali masalah dan kesenjangan mengenai pandangan perempuan di masyarakat. Kemudian yang juga penting adalah tradisi, budaya dan interpretasi agama yang diskriminatif terhadap perempuan harus diubah. Itu adalah tantangan masa depan situasi perempuan di Asia Tenggara. Kesimpulannya adalah perlu adanya peningkatan situasi ekonomi secara umum tetapi juga perlu perubahan administratif dan social mindset. Begitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.

SAPARIAH SATURI

Saya bekerja di tempat yang *concern* terhadap lingkungan dan khususnya terhadap masyarakat adat. Sama seperti Patrick, saya bukan ahli gender, saya hanya berupaya untuk merekam potret masalah-masalah yang terjadi di masyarakat adat. Saya akan bercerita khususnya tentang perempuan-perempuan adat. Sebenarnya saya ingin mengkonfirmasi apa yang Patrick ceritakan tadi. Dia menceritakan kondisi di Asia Tenggara. Kita melihat lagi Indonesia memang benar kondisinya bagi perempuan cukup buruk. Saya akan membawa lingkup yang lebih jauh lagi. Mungkin sebagian dari kita seringkali melihat adat atau tradisi di sisi yang *happy* seperti tari-tarian, upacara, ritual adat. Awalnya saya juga begitu, hanya tahu kulitnya. “Oh ini bagus nih, asik

nih", ketika saya melihat karya seni dari berbagai tradisi, tetapi ketika saya ke lapangan, saya mulai melihat kondisi mereka dan sesungguhnya kita ini sangat bersyukur. Walaupun perempuan Indonesia masih ada di taraf yang rendah dalam berbagai bidang, tetapi kita sudah punya hak hidup. Masyarakat adat yang hidup di negeri ini, mainstreamnya dari Sabang sampai Merauke, sebagian besar hak-hak dasarnya susah untuk didapat. Permasalahan muncul mungkin sebelum Indonesia ada, tetapi kondisinya lebih gila lagi ketika Orde Baru. Soeharto memimpin dengan konsep eksploitasi. Sebagian besar UU yang dibuat, UU Pertambangan, UU Penanaman Modal misalnya. Indonesia itu negeri yang *Gemah Ripah Loh Jinawi*. Tambang ada, hutan banyak, semua ada dan kita bisa kaya dengan itu. Ketika itu mulailah izin-izin diberikan oleh pemerintahan Soeharto, lewat HPH, awalnya ribuan hektar untuk pengusaha tinggal tunjuk lewat peta, "oh ini kosong, enak nih dibuat di sini." Di Kalimantan, Papua misalnya. Saya sedih jika menceritakan kembali hal ini. Pemerintah tidak sadar di lahan yang mereka lihat kosong di peta itu ternyata banyak manusia-manusia yang hidup. Di situlah masyarakat hidup. Pemerintah tidak peduli. Ketika perusahaan masuk, masyarakat melawan, mereka ditangkap, ditembak. Itu secara umum, belum yang perempuan. Para perempuan itu mendapat double masalah. Masalah hak-hak, mereka terdiskriminasi karena seperti apa yang Bu Mayling katakan tadi, banyak tradisi yang mendiskriminasikan perempuan. Di beberapa komunitas itu terjadi. Perempuan ada tetapi dianggap tiada. Dan juga mereka terbebani dalam internal, mereka juga terdiskriminasi oleh adat, misalnya mereka tidak boleh memberikan keputusan. Itu terjadi di komunitas tertentu dan itu berlanjut pada saat era Soeharto. Mereka berteriak sendiri. Mengapa dahulu saya tidak pernah mendengar teriakkan mereka? Apa mungkin saya tidak peduli? Saya tidak tahu tetapi teriakkan mereka memang tidak muncul walaupun UU 1945 mengakui keberadaan masyarakat adat dan bahwa mereka harus dilindungi di Pasal 18, tetapi di dalam aplikasinya itu tidak ada. Sekarang berbagai gerakan adat mulai muncul, masyarakat mulai bangkit dan perjuangan-perjuangan mereka mulai terlihat termasuk perjuangan-perjuangan perempuan adat. Misalnya dari tulisan yang ada di Jurnal Perempuan saya ambil contoh Ibu Mardiana dari Kalimantan Timur. Dari tahun 1980-an ia berjuang tetapi tidak ada yang tahu dan bantu. Ia melihat bagaimana masyarakat adat, terutama perempuan-perempuan adat yang kehilangan hidup. Bagi mereka, hutan adalah ibu mereka. Alam adalah ruh-ruh mereka. Budaya mereka ada di sungai, budaya mereka ada di hutan, dan ketika itu hilang mereka kehilangan budaya, adat, tradisi dan kehilangan hidup. Sebagian dari mereka diungsikan, hutan mereka dibersihkan oleh sawit. Mereka harus mengungsi ke tempat yang tidak memenuhi kehidupan mereka. Waktu itu saya pergi ke Sumbawa, itu proyek pemerintah. Pemerintah membuat bendungan dengan alasan untuk pasokan air petani, tetapi ketika masuk ke dalam, rupanya mereka mengusir satu kominutas yang desanya itu pas berada di tengah-tengah bendungan. Itu terjadi tahun 1980-an. Saya pergi tahun 2014 melihat mereka. Kehidupan mereka sangat menyedihkan. Di atas 50% miskin. Ketika pemerintah memberikan ganti rugi, pemerintah tidak memperhitungkan lahan-lahan mereka. Sementara dahulu mereka lahannya luas sekali, mereka tanam padi, agroforestry. Dahulu sudah bagus tetapi sekarang mereka kesusahan kerja jadi buruh atau meran-

tau, dan bahkan mereka mendapat klaim dari pemerintah karena kawasan itu berubah menjadi hutan lindung sehingga mereka dicap sebagai perambah atau pencuri. Beberapa orang ditangkap.

Perempuan-perempuan yang dulu bisa hidup di situ menjadi bertambah bebannya. Beban ganda ketika suaminya pergi ke luar mencari kerja, istri harus mencari nafkah dan mengurus rumah. Belum lama ini Komnas HAM melakukan Inquiry Nasional dan mengambil 40 kasus masyarakat adat yang ada di kawasan hutan. Komnas Perempuan juga turut ikut untuk melihat hak-hak perempuan adat yang terabaikan. Dari hasil inquiry begitu banyak hak-hak dasar, dari mulai hak hidup, hak ekonomi dan sebagainya itu dilanggar oleh negara karena mereka tidak diakui, seolah mereka tiada. Semua hak mereka dilanggar oleh negara.

Pada era ini memang ada angin segar tetapi semua baru janji. Saya harusnya optimis, tetapi jujur saja saya masih pesimis. Ada janji dari Presiden dia akan hadir di tengah-tengah masyarakat adat. Pemerintah mengakui keberadaan mereka dengan memasukkan wilayah-wilayah mereka ke dalam peta nasional. Sekarang ini wilayah-wilayah mereka tidak ada di dalam peta nasional makanya ketika memberi izin bisa seenaknya, memberi izin tambang dan sawit. Jadi yang pertama janjinya wilayah mereka akan dimasukkan ke dalam peta nasional, kemudian yang kedua janjinya konflik-konflik mereka akan diselesaikan. Selama ini di dalam perjuangannya, perempuan-perempuan adat banyak yang memimpin. Sebenarnya dari dulu banyak perempuan adat yang bangkit memimpin perjuangan-perjuangan adat seperti Aletta Baun dengan komunitasnya. Mereka melawan perusahaan tambang dengan menenun. Perjuangan yang manis sekali dan akhirnya sukses. Perlawanannya sangat gigih, sampai dicari-cari ingin dibunuh sampai melarikan diri bersembunyi di hutan. Itu semua ibu-ibu dan perempuan-perempuan adat. Mereka bersama-sama menenun dan akhirnya perusahaan tambang itu angkat kaki dan sampai sekarang aman. Tadi ada janji-janji pemerintah yang ingn memasukkan wilayah masyarakat adat ke dalam peta sehingga mereka boleh membuat KTP dan menuliskan agama aslinya. Selama ini kan mereka harus memilih agama seperti di Kalimantan, pilih Islam atau Kristen misalnya, meskipun pada praktiknya mereka menjalani ritual Kaharingan.

Pemerintah juga berjanji bahwa kearifan lokal mereka misalnya dalam menjaga hutan akan diakui. Meskipun sejauh ini baru janji, tetapi janji itu kan bisa kita tagih. Saat ini saya kira titik cerah dan optimisme itu ada. Kalau kita melihat lagi, perempuan-perempuan adat sekarang mulai mengorganisasi diri, apalagi sekarang ada Aliansi Masyarakat Nusantara. Pada tahun 2013 juga dibuat secara khusus sayap organisasi tentang perempuan adat. Jadi perempuan adat di berbagai daerah dikaderisasi salah satunya untuk berjuang mencapai kesetaraan gender. Itu masa depan mereka. Riilnya saat ini masih memperjuangkan keberadaan mereka sambil melangkah maju bahwa perempuan-perempuan adat juga bisa eksis di politik dan di berbagai bidang. Ya, saya kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

TANYA & JAWAB

Dewi Candraningrum: Sahabat sekalian, sehari yang lalu, kemarin siang, ada sekitar 3 bus dari pegunungan karst, Kendeng, pantai utara Jawa dan mereka menuju UGM. Jurnal Perempuan melakukan penelitian dan riset di pegunungan karst, Kendeng sejak Agustus lalu. Pelayanan pengetahuan paling pertama memang pengabdian dan yang menggelikan adalah dua hari sebelumnya saksi ahli dari Universitas tersebut mengatakan bahwa di pegunungan karst, Kendeng itu tidak ada air dan tandus. Lalu ibu-ibu dengan wajah yang sungguh merah, mereka mendatangi UGM dan mereka meminta Profesor Dwikorita Kurniawati (rektor UGM) untuk mengevaluasi kembali pernyataan dua staf ahli itu. Jadi Jurnal Perempuan selama 19 tahun mengabdi kepada pengetahuan. Kalau Descartes bisa berbicara 'I think therefore I am', saya berpikir, maka saya ada, Julia Kristeva seorang filsuf perempuan Prancis mengatakan 'I love therefore I am', saya kasih, saya sayang, saya mencintai, maka saya ada. Silahkan bagi yang ingin menambahkan sesuatu, membagi informasi, atau curhat,.

YULIA PRATIWI, SJP SEJAK 2012

Saya Yulia Pratiwi dari Rindang Banua. Mendengar penuturan Mbak Sapariah, saya teringat pada isu yang sekarang muncul dari pemerintah bahwa pada tahun 2017 itu akan zero pekerja rumah tangga migran. Ini kan sudah dimulai pada zaman Revolusi Hijau, di mana para perempuan lalu tidak mempunyai pekerjaan di rumahnya, di kampungnya, di desanya. Sekarang karena pengrusakan hutan ini kemungkinan buruh migran semakin bertambah. Jadi saya ingin bertanya apakah mungkin tahun 2017 itu zero pengiriman buruh migran (PRT) ke luar negeri? Karena sekarang dan sudah lama di pedalaman Kalimantan itu di Puncak Kapuas terjadi banjir besar kalau hujan, dan kalau kemarau terjadi kekeringan. Orang bermain bola di sungai Kapuas pada waktu kemarau, dan lapangan bola kalau hujan menjadi danau. Itu terutama karena yang tadinya terdapat keanekaragaman hayati, masyarakat dapat hidup seperti orang rimba, sekarang menjadi kelaparan karena rimbanya sudah tidak ada. Di Kalimantan pun demikian karena para pejabatnya sangat tidak bijak dalam membuat kebijakan. Dimana-mana kelapa sawit, Kelapa sawit itu sangat merusak tanah dan tidak menyimpan air, sehingga pada waktu hujan terjadi banjir dan pada waktu kemarau lingkungannya kering kerontang. Dan para penenun di sana

yang bahan-bahannya terbuat dari alam, dari benang sampai pewarna, tidak punya lagi bahan-bahan itu, obat-obat juga. Binatang juga menjadi habis, karena hanya ada pohon kelapa sawit. Jadi saya rasa tidak hanya orang rimba di Sumatera yang kemungkinan kelaparan, barangkali di Kalimantan dan Papua juga sudah mulai mengalaminya. Sehubungan dengan kasus PRT tadi, ini kebetulan ada Ibu Linda, selamat pagi Ibu Linda, karena mengenai kasus PRT ini, kok tidak kedengaran ya suara Menteri Perempuan sekarang. Bagaimana kita bisa melindungi PRT yang di luar negeri kalau undang-undang RUU PRT yang sudah 11 tahun diperjuangkan, sekarang di DPR juga tidak masuk. Ini kok kayaknya lebih maju di zaman ibu Linda ya, Bu? Terima kasih.

Amsar A. Dulmanan: Selamat siang, saya Amsar dari Perhimpunan Rumah Indonesia. Ada problem yang paling signifikan ketika proses pembangunan itu terjadi, yaitu industrialisasi dan modernisasi karena program itu dibarengi dengan pemberdayaan sumber daya manusia Indonesia, terutama pada pola penguatan basis politik. Di sana kalau bicara lingkungan hidup ada kapasitas yang sangat luar biasa, yaitu kelas tengah. Mereka itu sama dengan profesor yang tidak bersertifikat. Para peneliti itu menjadi profesor tetapi basis keilmuannya adalah masyarakat adat pendamping yang lebih paham misalnya tentang pohon. Jadi seperti mengcopy paste kemampuan masyarakat adat lalu sertifikasinya diambil. Di masyarakat Baduy ada sekitar 260 lebih pohon termasuk tanaman obat yang ada 40 kualitas tanaman yang habis semua dengan pola modernisasi yang tidak melalui studi kelayakan. Begitupun di beberapa daerah. Ketika Ibu Mega menjabat presiden, ada eksploitasi hutan adat yang diubah menjadi hutan produksi. Ada satu UU “kecolongan” di situ sebetulnya. Hutan adat atau hutan lindung bisa diubah jadi hutan

produksi. Dalam masyarakat tertentu juga, misalnya di Gunung Ciremai ada yang mau dijual dengan penawaran yang sangat luar biasa. Sesungguhnya kita lalai di situ. Sekarang saja pohon manggis sudah menjadi sarana industri. Sabun yang kita kemas, diproduksi dengan sangat luar biasa karena ada eksploitasi yang tidak dibarengi pola penguatan dan pemberdayaan. Dan bahkan yang sangat naïf lagi, masyarakat adat itu dijadikan seperti model, ketika kita bicara secara psikologi, orang sakit atau orang gila menjadi tontonan di dalam periodisasi tertentu. Dianggap lucu, seperti sirkus dan lain-lain. Masyarakat adat itu seakan-akan kalau perlu dibuat kerangkeng. Pola pemberdayaannya itu dibuat pagar sehingga mereka menjadi sarana wisata dan fasilitas industri. Pluralitasnya sangat luar biasa. Kemudian prinsip tradisi, hilangnya lingkungan hidup dan pola industrialisasi yang masuk ke pedesaan akhirnya memaksa mereka untuk menjadi buruh ke luar negeri. Di Arab itu menjadi problem bagaimana di dalam konstruksi adat, mereka tidak menjadi buruh tetapi budak. Itu yang terjadi karena ada adat bagi masyarakat Arab yang ternyata para pengirim itu mengeksploitasi besar-besaran dari jumlah migran yang bisa ia setorkan ke agen sehingga ia mendapat komisi yang besar. Pemerintah lalai di situ. Di dalam industrialisasi sebenarnya jika kita membicarakan pemberdayaan perempuan, saya sering bilang ke perempuan, ada prinsip kesetaraan yang harus dituntut dan harus dibarengi dengan kesadaran pemberdayaan dari perempuan, juga pendampingnya dan para tonggaknya. Problemnya memang kadang-kadang laki-laki juga dieksploitasi oleh perempuan. Di satu sisi perempuan paling senang bergaul dengan laki-laki karena laki-laki memang bodoh, di sisi lain laki-laki senang bergaul dengan perempuan karena perempuan paling senang dibodohi. Terima kasih.

Ririn Sefsani: Selain di Kemitraan, saya dan beberapa teman juga membuat sekolah politik perempuan di Palu. Kita sudah menghasilkan 500-an alumni dari sekolah politik perempuan itu. Di sana ada dua hal yang kita bisa share bersama. Sekarang ini berbagai gerakan sosial dan politik yang ada mencoba mencari identitas diri, baik identitas religius, identitas budaya atau identitas dirinya yang kemudian justru tidak sepenuhnya mendukung arah gerak terhadap tatanan masyarakat yang lebih adil. Misalnya sebagai contoh, tadi Pak Patrick sudah menyampaikan soal diskriminasi di Indonesia. Saya mungkin agak berbeda dalam melihatnya. Misalnya sekarang ini, sepertinya kita penting untuk memperlihatkan kalau perayaan Nyepi, ada kelompok Kristen dan kelompok Islam dalam bentuk pawai itu mengucapkan hari raya Nyepi. Saya baru tadi pagi membuka di berita ada hal tersebut. Jadi kelompok Kristen itu menyampaikan selamat atas perayaan Nyepi. Mengapa harus di dalam bentuk simbolik seperti itu? Padahal di dalam konteks tertentu ini juga memunculkan perbedaan yang sangat nyata dengan kelompok yang lain. Kenapa yang simbolik ini yang sejak lama dipakai oleh negara muncul kembali? Akibatnya kemudian dalam beberapa aktivitas dalam konteks gerakan perempuan memunculkan inisiatif-inisiatif lokal terhadap kelahiran kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Saya tidak tahu bagaimana kawan-kawan menyikapi fenomena seperti ini. Karena memang muncul kelompok-kelompok fundamental yang kanan dan negara masih cukup abai, di era SBY abai dan di era sekarang masih belum kelihatan sikap politiknya.

Kemudian yang kedua, sangat menarik berbicara dalam konteks sumber daya alam dan ketidakadilan yang dialami kawan-kawan perempuan. Meskipun itu tidak ada yang cukup banyak yang melakukan riset yang mendalam tentang itu. Pertama, dalam konteks masyarakat kita juga muncul relasi kuasa yang sangat tidak imbang antara laki-laki dan perempuan. Tetapi begitu investasi datang, kelompok perempuan ini memiliki beban yang semakin luar biasa. Satu, di komunitas adatnya dia tidak mempunyai hak suara. Kemudian saya pernah di Papua dan Kalimantan Barat dalam beberapa meeting dimana di dalamnya terdapat teman-teman masyarakat Aceh dengan AMAN, juga di NTT dengan Mama Aletta, kalau NTT cukup dinamis karena kelompok perempuan sudah teroganisir, tetapi di Papua dan Kalimantan Barat ketika kami sedang mengadakan pertemuan justru hampir tidak ada perempuan di dalam diskusi atau rapat itu padahal membicarakan tentang hak komunal mereka terhadap alam, terhadap hutan yang terancam investasi sawit dan karet. Dan begitu investasi datang, di mana peran perempuan dalam mengelola hak-haknya juga hilang. Bahkan untuk bernegosiasi terhadap investasi dan pemerintah, perempuan tidak dilibatkan dalam proses keputusan kawan-kawan adat. Meskipun di kelompok lain, di beberapa komunitas adat yang lain, situasinya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, saya melihat saat ini misal kita berbicara reformasi birokrasi, nanti Ibu Linda bisa sedikit sharing juga, bahwa dalam konteks kebijakan reformasi birokrasi di mana saat ini sudah memasuki gelombang ketiga, hampir juga keseluruhan kebijakan itu masih cukup bias terhadap gender bahkan isu-isu itu tidak muncul. Sekarang misalnya ada undang-undang aparatur sipil negara yang di dalamnya ada seleksi terbuka jabatan tinggi, meskipun ini tidak terbuka dalam proses seleksinya, bahwa perempuan yang melawan itu punya catatan khusus bagi tim

seleksinya. Saya sendiri melihatnya dalam konteks reformasi birokrasi, isu gender itu masih cukup tidak dilihat. Saya kira itu beberapa sharing yang mungkin teman-teman bisa member inspirasi. Terima kasih.

Mayling Oey: saya hanya ingin bertanya kepada Pak Amsar. Kalau ada diskriminasi itu apa yang harus dilakukan? Memang di masyarakat adat, peraturan kita sangat diskriminatif. Sekarang siapa yang bisa melakukan apa?

Amsar A. Dulmanan: problemnya memang banyak Bu dan ada pemberdayaan dari masyarakat adat termasuk AMAN sendiri. Memang adat dan tradisi, khususnya di Indonesia sangat diskriminatif. Perempuan hanya dianggap sebagai masyarakat kelas kedua. Di DPR dan MPR juga tidak pernah ada pembahasan serius bahwa perempuan memiliki potensi yang harus dikedepankan karena sesungguhnya dialah yang menjaga potensi radikalisme anak-anak kita. Sekarang kota ini lebih rawan karena banyak hotel berdiri dan ada agen-agen yang bahkan anak-anak SMA yang mencari dan menjual teman-temannya sendiri. Itu realitas yang sangat ngeri untuk bisa dipahami. Seharusnya ada proses pembangunan yang simultan, harus ada asas yang diletakkan pada prinsip kebijakan politik. Kebetulan saya punya Perkumpulan Rumah Indonesia bersama Eka Budianta. Memang problemnya cukup banyak. Jurnal Perempuan mungkin harus dibesarkan karena laki-laki itu tidak pernah berpikir untuk perempuan. Kalau mengutip Ki Hajar Dewantara “setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru” dan mendidik anak tidak hanya butuh orang tua, tetapi juga orang sekampung. Mungkin itu saja. Terima kasih.

Mayling Oey: Mungkin sedikit saja ya. Saya tidak mengerti diskursus tadi. Sebetulnya yang dipermasalahkan bukan eksplotasi antara manusia dan manusia. Yang kita bicarakan hanya soal diskriminasi, tetapi eksplotasi manusia oleh manusia mungkin bisa menjadi satu topik untuk Jurnal Perempuan. Di mana kekuatannya dan kelemahannya? Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Jadi satu hal yang sangat berkenaan dengan manusia, setelah Revolusi Industri di London itu banyak sekali penderitaan, penyakit banyak dan angka kematian tinggi sekali. Apa yang dilakukan oleh London? Dia berhutang untuk memperbaiki sistem-sistem di kotanya. Jadi sanitasinya dibersihkan. Itu menurunkan angka kematian banyak sekali. Sekarang ada eksploitasi manusia oleh manusia. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman Jurnal Perempuan sebagai gerakan bahwa itu tidak boleh lagi terjadi.

Dewi Candraningrum: Kita akan kembalikan kepada 2 narasumber dan juga Ibu Linda, tetapi sebelumnya kami ingin menginformasikan bahwa Jurnal Perempuan sudah mendokumentasikan riset tentang kawin kontrak di Puncak dan saya juga sudah melakukan wawancara bersama dengan Mbak Gadis dan kita temukan separuh adalah anak-anak dan mereka diperdagangkan. Saya tinggal di Solo, dalam 6 bulan terakhir kami mengadvokasi korban terduga Raja Solo. Saya masih ingat ketika kami mengevakuasi anak itu dari 2 orang perempuan trafficker. Jadi we are not only dealing with patriarch but we also dealing with mean women. Jadi saya membuat sketch karena saya tidak tahan, saya menangis ketika saya mengevakuasi anak itu. Paska melahirkan payudaranya mekar dan dia tidak tahu how to raise a baby. Saya kira kepelbagaian perempuan itu ada masing-masing keindahannya di dalam diri kita dan kita memiliki tugas

pelayanan itu. I love therefore I am. Waktu saya berikan kepada Mbak Sapariah, Mas Patrick dan Ibu Linda. Silahkan.

Sapariah Saturi: Tadi tentang tradisi ya, saya kira Ibu Linda lebih kompeten dalam menjawabnya tetapi saya setuju dengan Ibu bahwa itu adalah bom waktu. Jika ini dibiarkan oleh pemerintah, jika hutan-hutan itu semuanya dieksploitasi untuk tambang, untuk HPU, untuk sawit, untuk HPH dan untuk pembangunan-pembangunan lainnya dan mereka menafikkan bahwa di situ ada kehidupan yang sangat indah, ada kearifan-kearifan lokal yang terjaga. Di situ tersedia segala satwa, obat-obatan bagi mereka dan itu dihabisi sehingga mereka tidak punya kehidupan lagi. Ke kota juga susah, jadi tidak ada jalan lain selain menjadi buruh migran. Saya tidak yakin 2017 itu akan zero buruh migran, itu memang target tetapi seperti mimpi yang sulit direalisasikan. Kemudian untuk Bapak, saya setuju memang pembangunan itu ada dari 'atas'. Ini pembangunan, proyek, pekerjaan, masuk di suatu daerah, mengabaikan masyarakat adat yang benar-benar ditiadakan. Jadi ketika itu masuk, yang bercokol ya investasi itu, mereka hanya menjadi penonton. Janji-janji mungkin ada, seperti bahwa nanti bisa sejahtera, kaya, tanahnya dijual, bisa kerja di perusahaan sawit, gajinya bagus, jalanan menjadi bagus, setiap rumah diberikan air bersih dan listrik. Itu adalah janji-janji yang sudah masif di berbagai pulau-pulau besar. Pulau-pulau kecil sampai hilang, bahkan botak, sudah tidak ada kehidupan. Jangankan tumbuhan langka, bidoversitas kita yang kaya itu hilang tanpa dipedulikan. LIPI juga sedang riset mengenai Lost Biodiversity. Saya agak lupa tetapi kurang lebih 20-30% biodiversitas Sulawesi sudah hilang. Itu baru biodiversity, belum manusianya, banyak yang hilang karena meninggal atau mereka terpaksa pergi ke suatu tempat, sehingga adatnya juga hilang. Memang itulah fakta yang sekarang terjadi. Saya kira butuh kerja panjang bahkan jika ada upaya perbaikan. Selain pemerintah, saya kira masyarakat juga ikut. Seperti saya, wartawan, saya menceritakan dengan tulisan, jika ia seniman, dengan karyanya ia menyuarakan itu. Masyarakat umum juga harus diubah stereotipnya terhadap masyarakat adat. Banyak sekali muncul mitos-mitos bahwa mereka mengerikan.

Masyarakat Kajang di Bulukumba belum lama ini protes ke Trans TV yang membuat FTV yang menayangkan bahwa hutan larangan mereka itu horor dan mengerikan, padahal jika kita ke sana, cara masyarakat Kajang menjaga hutan itu sangat bagus. Dipisahkan seperti ini pemukiman, ini hutan larangan, ini sungai yang dijaga betul agar airnya tetap mengalir jernih. Mereka juga berkonflik secara langsung tetapi mereka bisa menjaga itu dan sekarang lagi menyusun Perda. Di sana juga ada kawasan untuk tanaman agroforestri. Kalau hutan larangan itu tidak boleh disentuh, yang masuk juga harus orang tertentu, tetapi dengan stereotip negatif masyarakat umum, jadi dibuat tayangan yang menampilkan betapa menyeramkan hutan itu. Ketua-ketua adat di sana menjatuhkan hukuman kepada warga adat yang ikut main di FTV tersebut dan mereka didenda adat. Trans TV sebagai salah satu media, dan juga bidang-bidang lain saya kira dengan perannya masing-masing harus menciptakan kesetaraan, terutama terhadap perempuan-perempuan adat.

Patrick Ziegenhain: Buku baru saya ini studi banding antara Thailand, Indonesia dan Filipina berjudul *Institutional Engineering and Political Accountability in Indonesia, Thailand and the Philip-*

pines. Saya senang sekali dengan diskusi ini, sangat inspiratif dan saya banyak mendapat pikiran baru dan saya harap begitu juga dengan anda. Terima kasih.

Linda Amalia Sari: Teman-teman Sahabat Jurnal Perempuan yang saya sayangi, pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena setelah selesai menjabat alhamdulillah saya bisa lebih fokus bergabung bersama dengan Jurnal Perempuan dan alhamdulillah diterima sebagai Sahabat Jurnal Perempuan. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Patrick. Saya ingin menyampaikan pengalaman selama saya aktif sebagai aktivis untuk pemberdayaan perempuan, selama 19 tahun di Kowani kemudian menjadi Menteri, secara peraturan perundang-undangan sesungguhnya pemerintah tidak ingin menyengsarakan masyarakatnya. Kita merdeka untuk maju. Kemudian kita dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia mungkin berbeda dengan negara-negara di Asia lainnya, perempuan Indonesia ikut berjuang di situ. Jadi secara sejarah perempuan Indonesia itu hebat. Itu yang harus menjadi pijakan kita sehingga kita tidak terlalu pesimis. Jadi kita bisa berbeda memandang Indonesia dengan negara-negara lain karena memang perempuan Indonesia terlahir sebagai seorang pejuang, artinya kita merdeka bersama-sama, kita juga mempunyai pahlawan perempuan yang sangat luar biasa yang diakui negara maupun yang tidak.

Sekarang bagaimana dengan saudara-saudara kita yang masih mengalami diskriminasi? Bagaimana luas wilayah Indonesia dan junlah penduduknya dibanding negara-negara Asia lain? Kecuali India dan China, begitu besarnya kita. Jadi memang masalahnya sangat kompleks dan tentu juga ada budaya-budaya yang menjadi kearifan lokal suatu daerah yang harus menjadi perhatian kita. Nah sekarang *How to solve the problem?* Tentu dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LSM, organisasi perempuan dan juga para pemerhati masalah perempuan ini menjadi suatu kekuatan tersendiri. Saya lihat bahwa kita punya kekuatan satu, selain UUD, CEDAW dan sebagainya, kita punya Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender di dalam pembangunan nasional, tetapi sifatnya hanya untuk eksekutif, oleh karena itu, saya sepakat tadi disampaikan mengapa UU kesetaraan tidak masuk Prolegnas? Inilah payung utamanya.

Di situ akan dibicarakan pembangunan yang inklusif, artinya untuk semua. Selama UU-nya tidak ada, tentu tidak akan mudah, walaupun bisa tetapi pendekatannya lebih kepada lobi kepada Pemerintah Daerah, peraturan menteri, peraturan pemerintah yang kadang-kadang tidak terlalu kuat. Jadi itu yang harus kita perjuangkan lebih awal untuk bagaimana meyakinkan pemerintah dan juga DPR mengenai UU kesetaraan gender dengan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Itu satu, Prof, karena memang kami tidak punya. Hanya UU 1945 yang memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada seluruh warga negaranya tidak dibeda-bedakan. Kemudian tadi ditanyakan juga mengenai hutan. Sebenarnya sudah dilakukan upaya-upaya pemberdayaan perempuan melalui kesepakatan bersama, jadi sifatnya lebih kepada surat edaran dan sebagainya. Kita coba untuk Inpres No. 9 tahun 2000 itu memasukkan penyusunan anggaran responsif gender. Itu harus dilakukan oleh semua kementerian dan lembaga yang telah diadvokasi oleh kementerian waktu itu di mana se-

mua programnya harus responsif gender. Lalu kesulitannya apa lagi? Ahli gender kita tidak banyak. Profesornya hanya 1, kemudian ahli gender tidak lebih dari 60. Bagaimana kita juga akan bicara gender responsif, apalagi penganggaran responsif gender yang tidak mudah, yang musti didorong, dengan jumlah penduduk yang segini besar? Dan itu juga beradanya di pulau-pulau seperti Jawa, Sulawesi ada sedikit dan Sumatera. Inilah hal-hal utama yang harus kita bangun dan supaya diberi ruang kepada universitas agar mereka mau membuka pendidikan-pendidikan untuk gender dan juga kajian-kajiannya. Mengenai penganggaran responsif gender, Kementerian Perhutanan telah melakukan langkah-langkah bagaimana pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan-perempuan yang bekerja di sektor kehutanan termasuk masyaraat adat. Namun ini kan eranya Otonomi Daerah. Di situ kita juga melihat lagi persoalan. Perempuan dan anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota, khususnya nomenklaturnya itu kadang-kadang digabung dengan pemberdayaan masyarakat dan lain-lain sehingga melemahkan. Saya sepakat dengan apa yang disampikan Profesor tadi, bahwa mindset masyarakat yang harus kita ubah. Kemudian juga pendekatan kepada laki-laki tidak dengan cara kontroversi, tetapi kita juga harus memberikan pemahaman gender itu melalui bagaimana kita ingin agar anak-anak perempuan dan laki-laki kita tidak mengalami diskriminasi. Artinya bahasa ini akan lebih mudah diterima oleh masyarakat luas, di mana masyarakat kita sangat patriarkis saat ini, tetapi tentu ini harus kita arahkan melalui bahasa yang tidak kontroversi, menarik dan melihat data. Data menjadi salah satu kekuatan apabila kita mau memperjuangkan perempuan ,oleh karena itu penguatan data juga menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Jika kita bicara masyarakat adat, datanya mungkin harus kita lihat seperti apa perempuan dan laki-lakinya. Kemudian di tataran pemerintah, masyarakat adat perlu juga difasilitasi. Mungkin hal itu sudah terjadi melalui LSM-LSM yang bergerak di bidang itu, namun jumlahnya perlu ditambah, AMAN juga diperkuat supaya mereka semakin percaya diri, pemberdayaannya juga semakin baik dan mereka bisa menjadi ujung tombak dalam melakukan langkah-langkah ini. Tentu juga kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat adat tentang perubahan. Perubahan itu selalu terjadi dan tidak dapat dihindari. Perubahan pembangunan, sikap, mindset dan sebagainya. Mereka harus memahami berbagai perubahan dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Ini mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Kita harus punya modul-modul cara-cara menghadapi perubahan ini untuk masyarakat adat. Itu lebih konkret saya kira. Mungkin sudah ada tetapi saya belum punya informasi tentang itu. Ini sangat penting sehingga tidak terjadi benturan-benturan di lapangan. Bagaimana kita melalui berbagai tulisan di Jurnal Perempuan bisa ikut membangun sampai masyarakat adat melalui tangan-tangan yang ada. Tentu tidak semua dapat membaca tetapi apakah bisa sampai ke mereka? Dengan pemahaman-pemahaman yang disesuaikan dengan kemampuan dan kearifan lokal yang ada pada mereka. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Tadi saya tertarik dengan Prof. Toety karena dia menyampaikan persepsi tentang gender di usia beliau yang sudah 81 tahun ini mungkin ada perubahan-perubahan. Tentu kita juga harus memahami pandangan-pandangan seperti itu. Demikian, terima kasih banyak atas kesempatannya.

Para Sahabat JP

Dewi Candraningrum:

Terima kasih Ibu Linda. Baik sahabat sekalian, kita berikan tepuk tangan kepada kita semua. Jurnal Perempuan ke-84 tidak hanya mendokumentasikan masyarakat adat Mayang, Kalimantan tetapi juga ada Toba, Sumatera, Madura, kebudayaan dan tradisi pernikahan dalam Katolik, kemudian tafsir Islam terhadap pernikahan juga ada di sini. Baik, kita saling berjejaring, kita saling berbagi tugas. I love therefore I am. Terima kasih. Lunch sudah disiapkan.

FOTO DAN DAFTAR PESERTA

SJP GATHERING KE-10

Daftar Peserta SJP Gathering ke-10

No.	Nama	SJP Tahun	Instansi
1	Adhi Ayoe Yanthy	2013	Program Officer Rumah Indonesia
2	Aida Vitayala S. Hubeis	2013	Guru Besar IPB
3	Amsar A. Dulmanan		Rumah Indonesia
4	Aprianita	Mewakili Menteri Sosial	Staf Ahli Kementerian Sosial
5	Aprileny	2012	Guru Sekolah High Scope
6	Ardiningtiyas Pitaloka	2015	Dosen Universitas Yarsi
7	Awaluddin Tjalla	2013	Dosen UNJ
8	Dhuha Hafiyansyah		Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
9	Elly Burhaini Faizal	2013	Wartawan The Jakarta Post
10	Evie Casino	2013	Direktur PR PT Pura Barutama
11	Fikriyah Rasyidi	2015	Mahasiswa S2 ICAS
12	Imel Sari	2014	Marketing Tasly
13	Jane Ardaneshwari	2012	Head of Editorial Development MRA Print Media/Publishing Group
14	Lestari Nurhajati	2013	Dosen Universitas Al Azhar Indonesia
15	Linda Amalia Sari Gumelar	2013	Pendiri Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta (YKPJ)
16	Lisa Septiani	2015	Mahasiswa S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
17	Lorensia Berlian Br Brahmana	2015	Staf Cantas Indonesia
18	Lovina		Riau Corruption Trial
19	Magdalena Sitorus	2012	Komnas Perempuan
20	Mardyana Ulva		
21	Mayling Oey-Gardiner	2012	Guru Besar FE UI
22	Meidy Wattimena	2013	Prudential
23	Merry Fridha TP	2014	Mahasiswa S3 Universitas Padjadjaran
24	Nadja Jacubowski	2013	Gender Focal Point Indonesia, Timor Leste and ASEAN GIZ
25	Patrick Ziegenhain	Pembicara	Goethe Universitat Frankfurt
26	Pinky Saptandari	2012	Dosen FISIP Unair
27	Puji Hastuti		Mahasiswa S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
28	Putri Puspita	2015	Mahasiswa S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

29	Rini Maghi	2014	Gender Advisor Plan Indonesia
30	Ririn Sefsani		Kemitraan
31	Rusdi J. Abbas	2015	Mahasiswa S3 Turki
32	Sally Astuty Wardhani	2013	Asdep Gender dalam Pendidikan KPP & PA
33	Sapariah Saturi	2015	Editor www.mongabay.co.id
34	Saparinah Sadli	2012	Pensiunan
35	Siwy Mega P.	2015	Mahasiswa S1 Universitas Gunadarma
36	Susanti Bunadi	2013	GIZ
37	Titien Pamudji	2013	KOWANI
38	Toeti Heraty Noerhadi	Pendiri Jurnal Perempuan	
39	Wiwit Setyorini	2015	Sylish Designer House of Kebaya
40	Yulia Pratiwi	2012	Pendiri Yayasan Rindang Banua
41	Yurina Widagdo	2015	